

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nilai perusahaan ialah hal yang bersifat vital dalam organisasi karena berhubungan dengan bantuan pemerintah dari investor. Nilai organisasi sangat vital sebab tujuan yang ingin dicapai oleh administrasi finansial ialah untuk meningkatkan nilai organisasi. Penghargaan organisasi yang ideal merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sejak didirikan. Nilai perusahaan yang ideal menjelaskan bahwa bantuan pemerintah dari pemilik organisasi juga ideal yang akan tercermin dalam biaya pertukaran sekuritas (Mardiyati et al., 2012). Perkembangan nilai organisasi yang tinggi dalam nilai organisasi ialah sasaran yang harus dicapai oleh organisasi yang terpancar dalam nilai pasar dari bagian-bagiannya karena evaluasi pendukung keuangan organisasi dapat dilihat melalui pengembangan biaya saham. dieksekusi pada perdagangan saham untuk organisasi yang telah terbuka untuk dunia.

Persaingan bisnis yang semakin kuat tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin membaik. Kemakmuran pemilik serta pemegang saham melalui peningkatan dari nilai perusahaan menjadi tujuan bagi setiap perusahaan untuk berusaha mencapainya. Nilai perusahaan merupakan nilai yang apabila perusahaan tersebut dijual calon investor (pembeli) bersedia membayar (Hasania, 2016). Semakin tinggi nilai perusahaan maka perusahaan akan memiliki citra yang semakin baik dan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi cerminan bagi nilai perusahaan.

Nilai entitas menjadi aspek penting karena tingkat ketinggian kesejahteraan investor berasal dari tingginya nilai entitas (Sutama & Lisa, 2018). Nilai organisasi sering dikaitkan dengan biaya pertukaran sekuritas, sehingga semakin tinggi nilai organisasi, semakin tinggi nilai organisasi begitu juga sebaliknya. Penghargaan organisasi yang tinggi menunjukkan keberhasilan investor yang tinggi juga sehingga hal tersebut menjadi harapan bagi pemegang saham agar nilai perusahaan terus meningkat.

Dengan tujuan memperjual belikan efek, BEI ialah wadah yang tepat untuk penjual (kekurangan dana) serta pihak pembeli (kelebihan dana). Berdasarkan sistematika yang teratur dalam UU Pasar Modal, perusahaan *go public* dapat tergabung dalam BEI dan menawarkan sahamnya kepada publik terlebih lagi, berikan total data yang terhubung dengan organisasi. Dengan menggunakan data didistribusikan oleh perusahaan maka, investor selaku pemilik modal menggunakannya untuk menakar kaasitas entitas dan dijadikan pedoman sebelum melakukan kepentingan dalam organisasi. Biaya saham pada perdagangan saham adalah kesan nilai organisasi merupakan imbas dari perilaku investor yang memperoleh setiap informasi perusahaan. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, perusahaan dikelompokkan dalam 12 sektor diantaranya, sektor energi, bahan baku, perindustrian, konsumsi primer, konsumsi non primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, serta produk investasi tercatat.

Banyaknya transaksi jual beli yang terjadi menjadi faktor penentu naik dan turunnya harga saham perusahaan dalam pasar modal, apabila sebuah saham perusahaan mulai tidak diminati sehingga investor mulai tidak tertarik bahkan

menjual saham kepemilikannya di perusahaan maka harga saham dapat mengalami down, begitu juga dengan keadaan sebaliknya apabila seorang investor melakukan pembelian saham dari entitas yang diminati maka saham entitas bersangkutan dapat terjadi kenaikan. Hasil kinerja keuangan perusahaan umumnya searah dengan kenaikan harga saham istilah lainnya peningkatan pendapatan atau kenaikan laba. Keyakinan akan keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan indikator atau dasar apakah *financial backer* berniat untuk menanamkan modalnya pada saham perusahaan tersebut (Zuriana, 2013). Kunci utama bagi *financial backer* untuk memilih saham adalah dengan memperhatikan faktor major dari kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, Sekalipun kinerja keuangan perusahaan bagus, harga saham perusahaan bisa turun sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham perusahaan., hal ini mungkin disebabkan oleh memburuknya kondisi pasar (bear market), menyebabkan sigma *financial backer* goyang (Aufa, 2013).

GCG diaplikasikan dalam organisasi untuk menghindari bentrokan diantara pengurus serta pemilik perusahaan karena adanya ketidaksamaan kepentingan sebab ketidakkonsistenan tanggung jawab. Pelaksanaan GCG yang baik seharusnya memiliki pilihan untuk membuat pelaksanaan organisasi menjadi ideal, dengan tujuan agar ada perluasan penilaian organisasi. Pada riset ini proksi dari GCG mempergunakan ialah Komite Audit, Komite Remunerasi serta *Corporate Secretary* (Sekretaris Perusahaan). Mengingat Peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015, dewan penilai ialah suatu majelis yang dibangun oleh serta dapat diandalkan oleh Dewan Komisioner dalam mendukung menyelesaikan kewajiban dan unsur pimpinan kelompok pimpinan. Tanggung jawab panel

peninjau dalam organisasi terbuka adalah wajib dan dibingkai serta dimaafkan oleh Dewan Komisaris. Badan pengawas pengawas dipimpin oleh seorang kepala otonom dan memiliki orang-orang dari luar penjamin atau organisasi publik. Mengingat Peraturan OJK Nomor 34/PJOK.04/2014 pasal 2 menyatakan bahwa penjamin atau organisasi publik diharapkan memiliki dewan kompensasi. Kompensasi adalah hadiah yang tidak sepenuhnya ditetapkan dan diberikan kepada individu dari badan pengatur dan individu dari kelompok pemimpin terkemuka karena posisi dan pekerjaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kewajiban, kewajiban, dan spesialis individu dari direktorat dan individu dari dewan komisaris (OJK, 2014). Dewan komisaris perusahaan menyusun panel kompensasi untuk membantu pelaksanaan yang layak dari kewajiban dan kewajiban kelompok pemimpin terkemuka. Organisasi yang layak adalah organisasi yang memiliki sekretaris organisasi (corporate secretary) dalam menata dan menyimpan dokumen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, dokumen perusahaan melibatkan individu-individu yang terlibat erat dalam pengambilan keputusan. Sekretaris Perusahaan adalah pejabat hubungan pendukung keuangan, pejabat konsistensi, dan Petugas penghubung memelihara dan memelihara catatan organisasi seperti daftar stok, daftar khusus perusahaan, serta risalah rapat pengurus dan RUPS (Surya dan Yustiavandana, 2006). Menurut Effendi (2016) GCG adalah kerangka kerja administratif di dalam organisasi untuk mengawasi pertaruhan signifikan yang ditentukan untuk memenuhi tujuan bisnisnya melalui perluasan nilai usaha yang dikeluarkan oleh para pendukung keuangan dan menjaga sumber daya organisasi. Andypratama dan Mustamu (2013) menetapkan kehadiran GCG pada organisasi adalah untuk mengontrol korelasi diantara

investor serta entitas eksekutif, untuk situasi ini kelompok utama kepala dan staf manajerial puncak, untuk mencegah kesalahan kritis dalam metodologi organisasi, dan untuk menjamin kesalahan yang terjadi segera cenderung. Organisasi yang dapat memenuhi standar GCG khususnya penerimaan, tanggung jawab, kewajiban, kebebasan, dan kesopanan adalah organisasi yang dikatakan memiliki pelaksanaan GCG yang baik. GCG dapat dimanfaatkan oleh organ Perusahaan untuk lebih mengembangkan pencapaian bisnis dan tanggung jawab Perusahaan dengan menerapkan standar GCG secara spesifik; Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, serta Kewajaran ditinjau dari peraturan material dan kualitas moral. Tindakan Tata Kelola Perusahaan secara andal dilakukan dengan menerapkan standar-standar penting GCG. Meski demikian, sejujurnya telah terjadi kasus-kasus moral keji dari Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, tahun 2019 menangani situasinya dengan kasus penyelundupan mobil Harley Davidson dan serta sepeda Brompton yang menjadi sorotan publik. Penyelundupan suku cadang Harley Davidson cruiser serta dua sepeda Brompton dilaksanakan dengan mempergunakan pesawat terbaru Garuda Indonesia Airbus A330-900 pada 17 November 2019. Kita dapat melihat menurut perspektif Etika di mana seorang supervisor PT. Garuda Indonesia tahu bahwa secara etis pesimis untuk menindaklanjuti sesuatu, sehingga banyak orang percaya bahwa tidak rasional bagi seorang presiden untuk mewujudkannya. Menkeu menyebutkan, suku cadang Harley cruiser bajakan dihargai 200 hingga 800 juta. Episode ini membuat presiden pengawas PT. Garuda Indonesia setuju digantikan dengan pilihan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan, Direktur Utama Garuda Indonesia terbukti telah mengabaikan Pasal 102 huruf a, siapa pun yang mengirimkan barang dagangan tanpa menyertakan konfirmasi kepabeanan dan Pasal 102 huruf b, membuang produk impor ke luar daerah adat atau tempat lain tanpa persetujuan pusat administrasi. Berdasarkan kasus diatas dapat dianalisis pelanggaran prinsip dalam mengelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi (*transparancy*) direktur dan stafnya sangat terlibat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. GCG setidaknya memiliki dua manfaat transparansi. Pertama, transparansi memungkinkan direktur dan pejabat eksekutif lainnya untuk bertanggung jawab pada seluruh pilihan serta kesalahan yang diperbuat. Kedua, keterusterangan bisa mengembangkan kepercayaan investor pada presentasi organisasi, baik yang berkaitan dengan administrasi perusahaan maupun keuntungan dari usaha. Penyelundupan Harley dan Brompton oleh Presiden Direktur PT. Garuda Indonesia jelas menyalahgunakan standar ini. Sebagai pejabat tinggi dalam suatu organisasi, standar keterusterangan harus diterapkan dengan tepat. Panglima Garuda itu terlihat membajak uang tunai agar tidak membayar bea kepada negara. Ini bisa mencapai Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar. Dampak dari pelanggaran keterusterangan ini secara fundamental akan mempengaruhi kepastian investor Garuda Indonesia. Porsi biaya Garuda Indonesia diduga turun 2,42%.

Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan tentang struktur, sistem, fungsi dan tanggung jawab merupakan topik penting bagi perusahaan. Direktorat organisasi dan badan pengelola memiliki kewajiban yang luar biasa untuk manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dewan direksi yang ada merupakan inti dari ide-

ide penggerak perusahaan dan oleh karena itu memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Dewan membuat sejumlah keputusan penting, termasuk penunjukan direktur, kebijakan dividen perusahaan, dan rencana pengeluaran. Pilihan ini juga merupakan suara para investor organisasi. Semua hal dipertimbangkan, Anda harus menganggap kepemilikan penuh. Dalam menerapkan standar administrasi perusahaan yang baik, para pemimpin organisasi jelas bertanggung jawab atas semua pertukaran, latihan, pilihan dan kecukupan kinerja organisasi.

Tanggung Jawab (*responsibility*), semua pilihan dan sistem yang dibuat oleh delegasi organisasi harus bertanggung jawab. Navigasi yang mampu adalah jenis konsistensi dengan pedoman terkait dalam organisasi. Kegiatan Direktur Utama Garuda sebelumnya mencerminkan kegiatan yang mengabaikan standar kewajiban administrasi perusahaan yang baik. Pimpinan PT diumumkan sesuai aturan penegakan Pasal 17 dan Pasal 102 UU 2006. Garuda Indonesia terancam hukuman minimal satu tahun penjara karena penyelundupan di bidang impor. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendenda Sekretaris Presiden Rp 100 juta karena menyelundupkan sepeda motor Harley-Davidson dan dua sepeda Brompton.

Independensi (*independency*), pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa organisasi menerapkan setiap standar administrasi perusahaan yang baik. Organisasi harus memiliki pilihan untuk bebas melakukan latihan mereka atau mandiri, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa paksaan, intervensi atau tekanan dari pihak luar. Berkaitan dengan ini, Garuda Indonesia akan bertindak independen di bawah arahan Presiden.

Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), perusahaan hendaknya dikelola agar semua pihak yang terlibat dalam perusahaan diperlakukan secara adil. Hak seluruh pemangku kepentingan harus dipenuhi dengan menghormati prinsip kesetaraan atau seadil-adilnya. Perbuatan Dirut dan Dirut PT Garuda Indonesia tersebut tidak bisa dibidang mengikuti prinsip ketidakberpihakan karena apa yang dilaksanakannya sangat luar biasa serta menjatuhkan citra Garuda Indonesia. Penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson serta dua sepeda Brampton melanggar norma para eksekutif perusahaan.

Kasus yang berbeda terjadi pada PT. Berlian Laju Tanker, Tbk. Organisasi dengan kode saham BLTA ini berpartisipasi dalam manfaat transportasi laut dan tercatat di BEI serta Bursa Efek Singapura. Pada tahun 2009 dan 2010 posisi moneter BLTA menunjukkan defisit total. Pada akhir 2011, organisasi tersebut membuat kagum sektor bisnis moneter Indonesia dan Singapura yang tidak dapat mengumpulkan komitmen moneternya ke lembaga moneter dan pemegang obligasi korporasi. BLTA memiliki kewajiban kepada penyewa bank/organisasi moneter sebanding dengan 1.655,49 juta dolar AS dan pemegang obligasi identik dengan 132,57 juta dolar AS. Mengingat keadaan saat ini, BLTA tidak dapat menyerahkan laporan anggaran 2011 yang dievaluasi kepada Securities and Exchange Commission dan masyarakat umum pada akhir Agustus 2012.

	(USD 000)	
Hutang Bank dan Lembaga Keuangan	31-Des-10	30-Jun-11
Hutang Jangka Pendek	14.459	15.122
Hutang Jangka Panjang	1.594.182	1.640.376
Jumlah	1.608.641	1.655.498

Gambar 1. 1 Hutang Bank dan Lembaga Keuangan

(Sumber : Iswandi,2012)

			(eqv USD 000)	
Obligasi	Keterangan	Rating Juli 2011	31-Des-10	30-Jun-11
Obligasi BLTA III	terbit 5 Juli 2007, jatuh tempo 5 Juli 2012, nominal IDR 700 milyar	idA- (Pefindo)	77.820	81.424
Obligasi BLTA IV	terbit 29 Mei 2009, jatuh tempo 28 Mei 2011, 2012, 2014, nominal IDR 400 milyar	idA- (Pefindo)	37.813	39.549
Sukuk Ijarah I	terbit 5 Juli 2007, jatuh tempo 5 Juli 2012, nominal IDR 200 milyar	idA- (Pefindo)	22.234	23.264
Sukuk Ijarah II	terbit 29 Mei 2009, jatuh tempo 28 Mei 2012, 2014, nominal IDR 100 milyar	idA- (Pefindo)	11.122	11.632
Diskonto belum diamortisir	terbit 5 Juli 2007, jatuh tempo 5 Juli 2012, nominal IDR 700 milyar		(728)	(614)
CPLTD	terbit 5 Juli 2007, jatuh tempo 5 Juli 2012, nominal IDR 700 milyar		-	22.682
Hutang Obligasi Bersih			148.261	132.573

Gambar 1. 2 Obligasi

(Sumber : Iswandi,2021)

Berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa gagasan administrasi perusahaan yang baik adalah melindungi investor serta kreditur dan mendapatkan kembali investasi mereka. Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada teori keagenan yang memahami korelasi diantara eksekutif dan pemilik. Sebagaimana dijelaskan pada OECD (2004), tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat korelasi antara eksekutif, staf manajerial puncak, investor dan mitra yang berbeda. Selain itu, menurut Prakarsa (2007), tata kelola perusahaan adalah mekanisme manajemen yang mengatur korelasi antara

manajemen, anggota komite, direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

CEO tenure dalam penelitian ini berubah menjadi perantara. Pembeneran untuk menggunakan perantara ini adalah bahwa langsung dari tempat tinggalnya, CEO diperlukan meningkatkan kemampuan serta otoritas mereka untuk mengisi kebutuhan posisi barunya. Pada saat itu, peluang keuntungan administratif meningkat. Fredrickson dkk. (1988) mengemukakan kelemahan mendasar terjadi saat residensi CEO tidak tepat ataupun setara tiga tahun. Setelah waktu selama tiga tahun, menjadi permulaan CEO mendapatkan kekuasaan serta menjadi kubu yang lebih besar. Presiden kepala memiliki kewajiban penting mengenai ringkasan anggaran organisasi. Suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik jika mendapatkan keuntungan besar serta biaya penawaran tinggi (Adiasih dan Kusuma, 2011). Selama masa jabatan ketua rektor, mitra mengantisipasi agar pameran organisasi meningkat tiap tahun, sehingga mendesak ketua rektor untuk memperkenalkan rangkuman anggaran organisasi serta dapat diharapkan.

CFP menjadi kapabilitas utama dalam mencerminkan kemajuan organisasi. Ini adalah kebutuhan yang tidak diragukan lagi bagi organisasi untuk meningkatkan dan mengikuti pelaksanaan organisasi sehingga tujuan mendasar organisasi dapat dicapai. Laporan fiskal digunakan oleh pendukung keuangan untuk melihat presentasi keuangan organisasi. Laporan moneter yang layak adalah laporan moneter yang, ketika didistribusikan, membuat respons pasar berisi data. Jadi laporan fiskal dikatakan memiliki kandungan data. Data yang terkandung harus memiliki pilihan untuk digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap bagian-bagian organisasi yang tercermin dalam hubungan hazard dengan seberapa besar

return yang disesuaikan dengan jenis bagian-bagian organisasi. Jika laporan keuangan yang didistribusikan dapat mendorong peningkatan minat untuk saham perusahaan, para pendukung keuangan menilai bahwa pameran perusahaan tersebut bagus. Ekspansi harga saham adalah jenis respon dari meningkatnya minat untuk saham yang membawa ekspansi dalam biaya saham organisasi. Proporsi moneter dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan moneter. Proporsi moneter dapat mengukur pelaksanaan moneter per periode dan mengevaluasi kapasitas dewan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi dengan cara yang ideal dan menarik. Barus et al. (2017) mengemukakan proporsi yang bisa dipergunakan pada pemeriksaan ikhtisar fiskal meliputi proporsi likuiditas, proporsi tindakan, proporsi kelarutan, dan proporsi produktivitas.

Syafitri et al. (2018) dan Fauzi et al. (2016) dalam penelitiannya menetapkan panel peninjau sebagai perantara GCG dapat mempengaruhi nilai organisasi. Riset Lastanti dan Salim (2018) menyatakan GCG berdampak pada nilai perusahaan. Afiani dan Bernawati (2019) juga memimpin riset dengan sekretaris perusahaan sebagai perantara GCG yang menyatakan tidak ada pengaruh dari *corporate secretary* pada nilai perusahaan. Widyaningrum (2019) juga mengarahkan penelitian tentang GCG yang diproksi oleh panel kompensasi yang menyatakan bahwa penghargaan organisasi dipengaruhi oleh dewan pengawas kompensasi. Dengan cara ini, sangat mungkin beralasan bahwa GCG yang diproksikan dengan petunjuk-petunjuk GCG dapat memutuskan apakah GCG berdampak pada nilai organisasi.

Riset terkait CEO Tenure pada nilai perusahaan juga terjadi inkonsistensi. Karundeng et al. (2016) ada risetnya memerlihatkan CEO Tenure tidak mendamaki nilai perusahaan. Namun Karina dan Setiadi (2020) serta Murnita dan Putra (2018) memperoleh hasil yang menunjukkan nilai organisasi didampaki oleh Masa Kerja CEO.

Beberapa riset terkait dampak *CFP* pada nilai perusahaan telah terlaksana. Riset Priyadi (2017) serta Pradita dan Suryono (2019) menemkan ROA yang merupakan perantara eksekusi moneter berdampak pada nilai perusahaan. Sementara Padmayanti et al. (2019) menemkan ROA serta *leverage* sebagai perantara eksekusi moneter secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.

Pada penelitian terdahulu terkait pengaruh *GCG*, *CEO Tenure*, dan *CFP* terhadap nilai perusahaan ditemukan hasil yang berbeda-beda di setiap variabel. Hal inilah menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti kembali aspek-aspek yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan di sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Faktor tersebut terdiri dari *GCG* yang diproksikan dengan *corporate secretary*, komite audit, dan komite remunerasi, *CEO Tenure*, dan *CFP* yang diproksikan dengan ROA. Pemilihan proksi dari variabel *GCG* karena *corporate secretary* dapat berguna untuk meminimalisir adanya asimetri informasi, karena *corporate secretary* memiliki peran untuk memastikan agen dan *principal* memperoleh informasi yang tepat. Komite remunerasi dapat berguna untuk meminimalisir konflik kepentingan dengan adanya kebijakan insentif. Insentif dapat mempengaruhi manajemen untuk dapat bekerja semaksimal mungkin dalam memakmurkan agen dan *principal*. Komite audit dapat meminimalisir terjadinya manipulasi laporan keuangan yang disebabkan karena

konflik kepentingan manajemen. Hal itu disebabkan karena komite audit bertugas mengawasi proses pelaporan laporan keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemilihan ROA sebagai proksi dari *CFP* karena ROA mewakili efektivitas perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba bersamaan dengan aset perusahaan. Kinerja perusahaan semakin baik apabila semakin besar nilai ROA nya. Kebaruan penelitian ini pada proksi yang digunakan dalam meneliti variabel *GCG* yakni *corporate secretary* dan komite remunerasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Ceo Tenure*, dan *Corporate Financial Performance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020)”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha menengah yaitu:

1. Perusahaan hanya memperhatikan faktor keuangan saja dalam menilai perusahaan.
2. Masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui pentingnya melaksanakan *GCG* terhadap peningkatan nilai perusahaan.
3. Penerapan *GCG* belum merata disetiap sektor, sehingga *agency conflict* sering terjadi di lingkungan perusahaan.
4. Penyampaian informasi yang tidak transparan serta tidak seimbang kepada setiap bagian yang terlibat dalam perusahaan.

5. Masa jabatan CEO (CEO Tenure) yang kurang dari 3 tahun mempengaruhi kinerja perusahaan dikarenakan masa awal menjabat sering terjadi kerentanan pada CEO
6. Faktor CFP mempengaruhi kinerja perusahaan karena yang paling utama dalam menilai *financial performance* suatu perusahaan adalah perusahaan yang harus mampu menghasilkan laba.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan identifikasi masalah, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai pengaruh yang ditimbulkan akibat penerapan *good corporate governance*, *ceo tenure* dan *corporate financial performance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana komite remunerasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
3. Bagaimana *Corporate Secretary* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?

4. Bagaimana *CEO Tenure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
5. Bagaimana *corporate financial performance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh komite remunerasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Secretary* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh CEO Tenure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
5. Untuk menganalisis pengaruh *corporate financial performance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam penerapan ilmu akuntansi khususnya mengenai Pengaruh *GCG*, *CEO Tenure*, dan *CFP* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor Transportasi yang terdaftar di BEI sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya. Hasil ini juga diharapkan dapat mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Pemilik Modal

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperhitungkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi

2.2 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan sektor Transportasi agar tetap memperhatikan tiga bagian dalam konsep triple bottom line sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang bagaimana *GCG*, *CEO Tenure*, dan *CFP* dapat mempengaruhi nilai

perusahaan sehingga nantinya dapat digunakan bahan pertimbangan dalam menentukan regulasi maupun kebijakan mengenai GCG oleh pemerintah.

2.4 Bagi Akedemisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *GCG*, *CEO Tenure*, dan *CFP* terhadap nilai dari perusahaan pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI serta dapat dipergunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2.5 Bagi Masyarakat

Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana *GCG*, *CEO Tenure*, dan *CFP* dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan.

